

## PEMERINTAHAN DAN POLITIK ETIS SERTA PENERAPANYA DI JAMBI

Mustika Ayu Wulandari<sup>1</sup>, Fatonah Nurdin<sup>2</sup>, Richad Saputra Adiguna<sup>2</sup>, M. Syahrul Damin<sup>3</sup>, Dinda Nurahayu Fitri<sup>4</sup>, Risda Yanti<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program studi ilmu sejarah Universitas Jambi

<sup>2</sup>Program studi ilmu sejarah Universitas Jambi

<sup>3</sup>Program studi ilmu sejarah Universitas Jambi

<sup>4</sup>Program studi ilmu sejarah Universitas Jambi

<sup>5</sup>Program studi ilmu sejarah Universitas Jambi

e-mail : [mustikaa739@gmail.com](mailto:mustikaa739@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatonah.nurdin@unja.ac.id](mailto:fatonah.nurdin@unja.ac.id)<sup>2</sup>, [richadadiguna@unja.ac.id](mailto:richadadiguna@unja.ac.id)<sup>3</sup>

Naskah diterima:17/10/2022, Naskah direvisi:19/11/2022, Naskah disetujui:22/11/2022

### ABSTRACT

*This study examines how the Dutch ethical government and political system and its application in Jambi. The background of this research is that there is a change in the government system that has occurred in Jambi, namely from the sultanate government system to a residency due to the influence of the Dutch who at that time began to dominate the Jambi region with the intent and purpose of being able to present valid data with quantitative methods. In this study, the method used is to collect sources and put them back in a descriptive narrative form that is easy to understand. Since the entry of the Dutch into Jambi, many government systems in Jambi have changed from a sultanate to a residency, one of the reasons is the existence of ethical politics where in its application it also brings many positive and negative impacts for the indigenous population, especially in Jambi, even though the Dutch have other goals, namely colonizing. and control the Jambi region. Even though the arrival of the Dutch to Jambi had an impact on the existing government system in Jambi, but the ethical politics brought by the Dutch had a positive impact on the progress of the indigenous people of Jambi, both in the fields of education, infrastructure development and health.*

*Keywords: Government System, Ethical Politics and Its Implementation*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sistem pemerintahan dan politik etis belanda serta penerapannya di jambi. Latar belakang dari penelitian yang di buat ini adalah adanya perubahan sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Jambi yaitu dari system pemerintah kesultanan menjadi keresidenan akibat adanya pengaruh belanda yang pada saat itu mulai menguasai wilayah Jambi dengan maksud dan tujuan dapat menyajikan data yang valid dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, metode yang di gunakan yaitu mengumpulkan sumber-sumber dan menuangkannya kembali dalam bentuk deskriptif naratif yang mudah di pahami. Sejak masuknya belanda ke jambi banyak sistem pemerintahan di Jambi sendiri mengalami perubahan dari kesultanan menjadi keresidenan, salah satunya penyebabnya yaitu dengan adanya politik etis dimana pada penerapannya juga

membawa banyak dampak positif dan negatif bagi penduduk masyarakat pribumi khususnya di Jambi walaupun belanda memiliki tujuan lainnya yaitu menjajah dan menguasai wilayah Jambi. Meski dengan kedatangan Belanda ke Jambi memiliki dampak pada sistem pemerintahan yang telah ada di Jambi namun dengan adanya politik etis yang di bawa oleh belanda memiliki dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat penduduk asli Jambi baik pada bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur maupun kesehatan.

**Kata kunci:** Sistem Pemerintah, Politik Etis, dan Penerapannya

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang di setiap periode nya, di mulai dari zaman di mana manusia belum mengetahui baca tulis dan hidup dengan keadaan sosial yang masih sangat tradisional hingga seiring berkembang nya ilmu pengetahuan manusia dapat hidup di zaman yang telah memiliki tatanan hidup yang lebih tertib dan terarah. Begitu pula sejarah politik di Indonesia dimana peristiwa ini tercatat dalam catatan sejarah sejak masuknya bangsa Eropa yaitu bangsa Spanyol dan Portugis (VOC) hingga pada masa di mana Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Sejak saat itulah banyak sistem politik yang di terapkan di Indonesia salah satunya yaitu politik kolonial konservatif, politik kolonial liberal, dan politik kolonial etis.<sup>1</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwasanya politik etis sendiri lahir akibat adanya kemerosotan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat penduduk Jawa sehingga Ratu Wilhelmina menyatakan dalam sebuah pidatonya kepada pihak Belanda bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat pribumi atas bentuk hutang budi nya terhadap masyarakat penduduk pribumi dengan menjalankan beberapa program seperti irigasi (pengairan), edukasi (Pendidikan), dan emigrasi. Akibat dari tuntutan inilah dimana yang pada awalnya Belanda telah memasuki daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia mulai melanjutkan misi politik etisnya di berbagai daerah tersebut termasuk di wilayah Jambi.

Belanda dalam menduduki wilayah Jambi membentuk sebuah sistem pemerintahan baru yaitu menjadikan wilayah Jambi yang awalnya berbentuk kesultanan menjadi wilayah keresidenan (1906).<sup>2</sup> Hal inilah yang mengakibatkan Jambi menjadi ibukota provinsi hingga saat ini. Selain itu kehadiran Belanda membawa perubahan bagi Jambi sendiri yaitu pada bidang politik (politik liberal dan politik etis), ekonomi (perkebunan) dan sosial budaya (westernisasi dan kristenisasi)<sup>3</sup>. Tidak hanya itu saja pada penerapannya sendiri, politik etis di Jambi membawa pengaruh dan perubahan besar salah satunya para pemuda penduduk pribumi di Jambi yang berprestasi bisa melanjutkan pendidikannya sampai ke Belanda.

Berdasarkan itu semua sehingga tulisan ini bertujuan menjadi salah satu sumber bacaan kepada khalayak ramai agar masyarakat khususnya para pembaca dapat mengetahui sejarah singkat dan identitas Jambi sendiri. Selain itu kita dapat mengetahui tentang bagaimana kehidupan pemerintahan dan perpolitikan di Jambi pada masa kekuasaan Belanda. Melalui tulisan ini dengan mengangkat permasalahan yang mungkin sebagian orang tidak mengetahuinya yaitu tentang

---

<sup>1</sup>Muhammad Khozy, "Politik Etis Penerapannya di Provinsi Jambi," .

<sup>2</sup>Rizki Transiska, "Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda Dan Respon Umat Islam Di Jambi (Tahun 1915-1942 M)," *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 20, no. 1 (2021): 1.

<sup>3</sup>Siti Sholekhah dan Reka Seprina, "Jambi Masa Kolonialisme Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah : Study Kasus Sistem Pemerintahan Belanda Tahun 1615-1942" 1, no. 2 (2022): 4.

sistem perpolitikan dan politik etis yang pernah terjadi di Jambi pada masa pemerintahan kolonial belanda, sehingga fokus tulisan ini adalah hanya kepada sistem pemerintahan, politik etis dan Jambi.

Dengan adanya tulisan ini tidaklah lepas dari berbagai sumber yang di dapatkan sehingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan yang dapat di baca yaitu salah satunya tulisan dari Siti Solekha dan Reka Seprina dalam jurnal nya yang berjudul " *Jambi Masa Kolonialisme Imperialisme sebagai sumber Pembelajaran sejarah: Studi Kasus Sistem pemerintahan Belanda Tahun 1615-1942* " yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Belanda yang di terapkan menggunakan kebijakan politik liberal dimana sistem politik liberal memiliki dua bentuk sistem politik lainnya yaitu yang *pertama* sistem politik terbuka dan yang *kedua* sistem politik etis, dan tulisan dari Muhammad Khozy dalam artikelnya yang berjudul " *Sejarah Politik, Peristiwa Besar: Politik Etis, Penerapannya di Provinsi Jambi* " menyebutkan bahwa adanya politik etis memiliki tujuan sama, hutang budi antara pemerintahan belanda dengan penduduk pribumi yang menjadi tugas moral bangsa Belanda dengan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat penduduk pribumi melalui beberapa programnya. Selain itu dengan adanya politik etis membawa dampak positif bagi Jambi. Dimana sumber ini menjadi sumber pendukung pada penulisan ini, selanjutnya yaitu tulisan dari Nur Laely dalam sebuah tesis nya yang berjudul " *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942* " yang menyebutkan bahwasanya sistem pemerintahan kolonial memiliki dasar pemerintahan yang bersumber dari UUD Kerajaan Belanda dan UU Pemerintahan Hindia Belanda (1925) serta sebuah buku yang di tulis oleh Margono, Hartono Chaniago dan Mujilan J.R. yang berjudul " *SEJARAH SOSIAL JAMBI Jambi Sebagai Kota Dagang* " dimana di dalam tulisan tersebut di jelaskan bagaimana keadaan sosial budaya masyarakat Jambi pada masa pendudukan Belanda.

## **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan cara atau langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dalam melakukan sesuatu. Dalam penulisan sejarah memiliki empat metode dalam pelaksanaannya sendiri yaitu yang *pertama* adalah heuristik yang artinya pengumpulan data melalui upaya pencarian literatur yang relevan dengan tulisan yang dibuat. Pengumpulan data meliputi pengamatan, pemahaman dan menganalisis secara langsung tentang topik yang di bahas yaitu sistem pemerintahan politik etis dan penerapannya di Jambi. Yang *kedua* kritik sumber yang artinya pengujian terhadap data-data atau sumber-sumber untuk mengetahui apakah sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dengan memilah kembali sumber-sumber seperti buku, literatur dan artikel yang sesuai dengan topik yang diteliti. Yang *ketiga* interpretasi yang artinya menafsirkan atau memaknai kembali fakta atau bukti sejarah yang telah didapat sebelumnya sehingga dapat menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan dapat

digunakan dalam memecahkan masalah yang terkait persoalan penelitian tersebut. Dan yang *keempat* historiografi yang artinya penulisan sejarah.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### Sistem Pemerintahan Belanda di Jambi

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kedatangan Belanda ke Nusantara khususnya juga wilayah Jambi bukan semata-mata hanya ingin berdagang atau sebagainya, namun ada niat khusus atau tujuan tersendiri yang ingin dicapainya. Salah satunya yaitu ingin menjajah dan sekaligus menguasai wilayah jajahnya tersebut. Pada masa pendudukan Belanda di Nusantara, banyak kebijakan yang diterapkan salah satunya yaitu kebijakan desentralisasi, birokrasi dan feodalistis demi kepentingan pemerintahan kolonialnya sendiri.

Dalam pemerintahannya sendiri Belanda memiliki dasar-dasar dalam memerintah di wilayah kekuasaan kawasan Hindia Belanda yaitu UUD (Undang-Undang Dasar) Kerajaan Belanda dan UU (Undang-undang) Pemerintahan Hindia Belanda yang di buat langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda (1925).<sup>5</sup> Dengan adanya pengaruh yang dibawa atau diajarkan oleh pemerintahan Belanda kepada masyarakat pribumi baik secara langsung maupun tidak langsung sedikit banyaknya berdampak pada berubahnya sistem pemerintahan yang telah ada di suatu wilayah. Seperti hal yang terjadi di Nusantara yaitu hilangnya sistem pemerintahan kerajaan (raja yang memimpin suatu wilayah) berubah menjadi bukan raja lagi.

Jambi merupakan salah satu wilayah yang diinginkan oleh bangsa Belanda untuk dijadikan salah satu wilayah kekuasaan yang utuh. Oleh sebab itu bangsa Belanda ingin membentuk wilayah Jambi menjadi wilayah keresidenan di bawah kekuasaan Belanda di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan banyak perubahan yang terjadi khususnya pada bidang pemerintahan di Jambi. Untuk Belanda sendiri memiliki kebijakan di mana mereka tidak boleh bertindak semena-mena untuk menghapus sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan yang telah ada sebelumnya di wilayah dimana Belanda berada, sehingga akhirnya Belanda mencoba melakukan jalinan hubungan politik terhadap pemerintah yang ada untuk menanamkan paham perpolitikan Belanda sehingga secara tidak langsung Belanda dapat menguasai wilayah tersebut secara perlahan.

Kesultanan Jambi resmi runtuh tahun 1906 dan akhirnya berdirilah keresidenan Jambi di bawah kepemimpinan kolonial Belanda. Kebijakan yang di buat pada saat itu oleh Belanda yaitu menyatukan hukum masyarakat sesuai tempat tinggalnya. Jadi dapat diperkirakan bahwa secara resmi Belanda mulai menduduki wilayah Jambi yaitu pada awal abad ke-20.

---

<sup>4</sup>Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 2 ed. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003). Lihat juga Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, 1 ed. (Yogyakarta, 2015).

<sup>5</sup> Nur Laely, "Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942," *Jurnal Pendidikan*, no. 3 (2018): 5.

Banyak perubahan yang terjadi sejak awal abad ke-20 di wilayah Jambi sejak pemerintahan Belanda mulai menduduki Jambi terutama pada kebijakan yang dibuat pemerintahan Belanda pada bidang perpolitikan yang mengalami perubahan. Sebagaimana yang di ketahui sebelum Belanda masuk ke wilayah Jambi, tata pemerintahan di wilayah Jambi pada masa kesultanan secara berjenjang dipimpin oleh sultan, jenang, batin, penghulu, tuo-tuo, dan tengganai<sup>6</sup>. Sedangkan dapat di gambarkan struktur pemerintahan Belanda dapat di lihat sebagai berikut:

1. Residen : kepala *gewest* / keresidenan
2. Konteler : kepala *afdeling* / wilayah / kabupaten
3. Demang : kepala Distrik / kewedanan
4. Asiaten demang : kepala onder distrik / kecamatan
5. Kepala adat : kepala wilayah ( desa )<sup>7</sup>

Pada saat Belanda menduduki Jambi, Jambi merupakan salah satu wilayah yang didirikan oleh Belanda dari 10 wilayah yang ada di Kawasan Sumatra timur. Sejak Jambi jatuh ke tangan Belanda banyak perubahan yang terjadi dalam pemerintahan dan kekuasaan Jambi, salah satunya yaitu kebijakan bebas dan etis. Sistem yang digunakan Belanda dalam mengatur kekuasaan di Jambi sendiri yaitu sistem politik liberal.

Desentralisasi, birokrasi, dan feodalisme merupakan sebuah sistem pemerintahan yang digunakan dalam masa pendudukan Belanda karena kepentingan politik kolonial. Sedangkan pemerintahan Belanda memiliki asas pemerintahan yaitu mempersatukan masyarakat hukum dengan menggabungkan beberapa desa kecil di daerah yang ada hukumnya dan yang daerahnya mempunyai milik sendiri, berdasarkan tempat tinggal masyarakat hukum tersebut.<sup>8</sup>

Banyak keuntungan yang didapatkan oleh pemerintahan Belanda selama menduduki wilayah Jambi yaitu salah satunya dalam bidang pertanian di mana hasil-hasil perkebunan dan pertanian rakyat yang sangat besar mengalir begitu saja ke pada pihak Belanda. Sehingga, Belanda mendapat keuntungan yang sangat besar dari pihak pemerintah Belanda dan swasta dengan mengekspor hasil perkebunan tersebut ke negara asing. Pada pemerintahannya sendiri juga akhirnya Belanda dapat memimpin pemerintahan di wilayah Jambi sehingga Belanda dengan bebasnya dapat melakukan politik bebas liberal dan monopoli perdagangan tanpa lupa memberikan pengaruh ideologi Barat kepada masyarakat di Jambi.

Selain itu juga Jambi memiliki keuntungan tersendiri yaitu pada perkembangan ekonomi di mana Jambi pernah mengalami masa keemasan atau masa kejayaanya. Tercatat Jambi termasuk sebagai pelabuhan ekspor produk-produk tambang dan

---

<sup>6</sup> Transiska, *op. cit.*, 2. Sultan sebagai pemimpin kerajaan, jenang sebagai pemimpin rantau, batin sebagai pemimpin nagari, penghulu sebagai pemimpin luhak, tuo-tuo sebagai pemimpin kampung atau dusun, dan tengganai sebagai pimpinan rumah.

<sup>7</sup> Sholekhah dan Seprina, *op. cit.*, 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 8.

hutan seperti minyak bumi, emas, karet serta lada yang di hasilkan dari tanah Jambi dan laku di pasaran internasional.

Agar lebih jelasnya perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Jambi dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut dalam rentang waktu 1906-1920

No	Tahun	Peristiwa Sejarah
1	1906	Jambi di perintahkan oleh 5 pemuda yang belum berpengalaman dari tahun 1906-1916 akibat adanya reorganisasi pemerintahan.
2	1908	Di kabupaten Bangko diterapkannya sistem <i>onderafdeeling</i> .
3	1912	Setelah adanya <i>onderafdeeling</i> yang terlalu luas, terjadi perubahan menjadi pelaksanaan pemerintah secara distrik. Jambi di masukkan ke dalam daftar wilayah hindia belanda karena di hapuskanya sistem administrasi yang lama pada masa kesultanan.
4	1914	Terjadinya perpergejolan di masyarakat akibat Belanda telah mendapat otonom dalam bentuk <i>gemeenteraad</i> atau sering di sebut sebagai karya kota media demi kepentingan penjajah.
5	1915	Sistem <i>onderafdeeling</i> dibagi menjadi 3 distrik dan salah satu nya ada dalam bentuk perngoganisian pemerintahan belanda di Muaro Tembesi.
6	1916	Dibaginya 9 distrik pada departemen menejemen pemerintah federasi Nan Betigo Contohnya wilayah Muaro Bungo.
7	1917	Jumlah penduduk sebanyak 138.539 jiwa pada keresidenan Jambi.
8	1918	Terjadi keresahan sosial masyarakat pada tahun 1914-1919 karena otonom <i>gemeenteraad</i> .
9	1919	Terjadinya kerisis ekonomi (krisis pangan terutama bahan pokok contohnya beras dan lain sebagainya) akibat perang dunia I tahun 1914-1919.
10	1920	Akiabat kerja paksa banyak masyarakat yang berpindah ke berbagai jalur.

Tabel 1. Perubahan Sistem Pemerintahan Jambi 1906-1920

Sumber: Wina Syandra Suryani, 2021, hlm. 5-6.

### Politik Etis dan Penerapannya di Jambi

Berdasarkan catatan sejarah yang ada bahwasanya konsep politik etis lahir sejak adanya tulisan dari C.Th.Van Deventer di majalah De Gids yang terbit pada bulan Agustus (1899) dengan judul “*Een Ereschuid*” (Hutang Budi). Dalam tulisannya disebutkan bahwa, adanya kemunduran dan penderitaan yang terjadi

pada masyarakat pribumi diakibatkan oleh eksploitasi kapitalisme yang gagal dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat pribumi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui bahwasanya Belanda memiliki tanggung jawab dan tugas moral untuk mensejahterakan penduduk pribumi. Pada awalnya politik etis berakar dari permasalahan kemanusiaan dan keuntungan ekonomi. Sedangkan pada pelaksanaannya sendiri, politik etis yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda memiliki kepentingan pribadi. Politik etis yang diterapkan menuntut bangsa Indonesia bergerak ke arah yang lebih maju namun tetap di bawah naungan pemerintahan Belanda. Politik etis di Indonesia secara resmi diterapkan pada bulan September 1901 saat Ratu Wilhelmina melakukan pidatonya dan juga merupakan pertanda baru bagi rakyat Indonesia untuk memulai zaman baru.<sup>10</sup>

Dengan adanya tuntutan dari Ratu Wilhelmina untuk menyejahterakan rakyat khususnya di Pulau Jawa maka semua yang berlangsung tidak terlepas dari ruang lingkup ekonomi. Sekitar abad ke-19 banyak orang-orang Belanda sudah mulai memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat pribumi karena kesejahteraan dan status masyarakat yang prihatin. Banyak usaha-usaha yang didirikan secara pribadi oleh orang-orang Belanda guna membantu menaikkan taraf hidup masyarakat pribumi pada saat itu salah satunya yaitu: pertama W. P. D de Wolff van Westerode dimana dia mengadakan perlindungan terhadap hutang dengan meletakkan dasar-dasar pengorganisasian bank kredit pada pertanian dan simpan pinjam. Kedua K. E. Holle dengan membantu secara langsung pada bidang pertanian kepada orang-orang Sunda dan berusaha memperbaiki keadaan yang sedang terjadi pada penduduk pribumi. Ketiga C. Snouck Hurgronje dengan membantu dan mengajarkan para penduduk untuk memahami dan memberi konsep tentang pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk.<sup>11</sup>

Namun tidaklah mudah untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat di Pulau Jawa saat itu. Akibat adanya aksi penaklukan daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda, mengakibatkan semakin luasnya wilayah kekuasaan Belanda dan akhirnya Pulau Jawa mulai terabaikan. Pemerintah Belanda lebih mementingkan pembangunan ekonomi baru pada komoditi minyak bumi dan karet guna menempatkan Indonesia pada garis depan perekonomian internasional di abad ke-20.

Dengan adanya penaklukan di berbagai daerah, Belanda akhirnya mulai menguasai wilayah Sumatra tanpa terkecuali wilayah Jambi. Karena wilayah Jambi ikut menyumbangkan hasil bumi yang besar mengakibatkan Jambi dipilih menjadi salah satu wilayah jajahannya yang baru. Adanya program baru dari

---

<sup>9</sup> Suddin Bani, "POLITIK ETIS" 1, no. 1 (2013): 4.

<sup>10</sup> Agus Susilo dan Isbandiyah Isbandiyah, "Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia," *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018): 407.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 408.

pemerintahan Belanda yaitu politik etis membuat wilayah Jambi ikut merasakan kebijakan politik etis yang di buat oleh pemerintahan Belanda.

Politik etis di Jambi telah ada sejak awal abad ke-20 dengan misi yaitu mensyejahterakan rakyat pribumi melalui tiga programnya (irigasi, edukasi, dan transmigrasi). Tidak hanya itu politik etis juga memberikan peluang besar bagi masyarakat pribumi dari golongan yang rendah untuk ikut merasakan pendidikan yang sama seperti golongan atas dengan membangun perluasan Pendidikan baik dari tingkat bawah yaitu sekolah dasar sampai ke tingkat atas (sekolah menengah dan perguruan tinggi seperti pamong praja, teknik dan kedokteran)<sup>12</sup>

Demi memenuhi tuntutan dalam politik etis ini, Belanda banyak memperbaiki irigasi yang ada di Jambi demi meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat pribumi di Jambi serta melakukan transmigrasi penduduk Pulau Jawa ke wilayah Sumatra khususnya juga di Jambi demi mengurangi populasi penduduk Jawa yang telah padat.

Politik etis Belanda pertama kali mulai diterapkan dengan mengenalkan Pendidikan Barat dengan membuka banyak sekolah-sekolah untuk masyarakat penduduk pribumi, berikut penjelasannya:

#### 1. Pendidikan

Secara garis besar pendidikan merupakan salah satu bentuk pengembangan diri, meningkatkan kemampuan kecerdasan seseorang dan lain sebagainya. Pendidikan dapat dilakukan di dalam sebuah lembaga pendidikan seperti lembaga sekolah maupun di luar dari lembaga kependidikan. Ivan Illich mengemukakan bahwa lembaga kependidikan dibagi menjadi tiga yaitu lembaga pendidikan formal, lembaga kependidikan informal dan pendidikan subsistem. Dalam perkembangan sejarah yang tercatat di Indonesia bahwa pendidikan formal baru dimunculkan oleh pemerintahan Belanda sekitar abad ke-20.

Begitu pula yang terjadi di Jambi dimana sekitar tahun 1914-1916 pendidikan di wilayah Jambi masih sangat sederhana.<sup>13</sup> Tingkat Pendidikan yang ada pada saat itu yakni *government* (sekolah menengah pertama) dan *vervolkschool* (sekolah dasar). Dimana sekolah-sekolah tersebut hanya memiliki jumlah yang terbatas dan pengelolaannya dipegang oleh pemerintah belanda.

Dalam pembentukannya sendiri Pendidikan di Jambi dikelompokkan menjadi dua yaitu pendidikan dengan dasar-dasar pribumi dan pendidikan Barat. Pendidikan dasar pribumi adalah pendidikan yang dikhususkan untuk masyarakat pribumi sampai ke pelosok desa dengan tujuan melatih para terdidik agar dapat bersaing dengan para penduduk pendatang. Selain itu di harapkan juga dapat memberantas penduduk pribumi akan buta huruf, baca tulis serta melatih pendidik agar mamapu menjadi pegawai rendah tenaga administrasi yang baik. Sedangkan pendidikan Barat adalah pendidikan yang dikhususkan untuk orang-

---

<sup>12</sup> Khozy, *op. cit.*, 4.

<sup>13</sup> Hartono Margono dan Mujilan J R Chaniago, “ Milik Depdikbud Tidak diperdagangkan SEJARAH SOSIAL JAMBI J ambi Sebagai Kota Dagang,” 2019, 69.

orang Eropa dan para saudagar kaya dengan sistem pendidikan berbahasa Belanda.

Pengelompokan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda tersebut dilihat berdasarkan jabatan-jabatan penduduk yang dimiliki. *Pertama* pendidikan Barat, dimana dalam sistem pendidikannya sendiri pada masa Karesidenan Jambi digolongkan menjadi dua bentuk sekolah dasar (Pendidikan dasar). Pendidikan dasar yang pertama yaitu di peruntukan oleh orang-orang Eropa atau sering di sebut sebagai *Europeesch Lagere School* (ELS). Adapun sistem pengajaran yang di lakukan oleh ELS mengguankan pengajaran yang sama tingginya dengan sekolah di negeri asal (Belanda). Sedangkan untuk di wilayah Jambi sendiri, sekolah ELS hanya ada satu yaitu di wilayah ibukota Karesidenan Jambi dengan seluruh muridnya adalah anak-anak dari orang Belanda asli yang bertempat tinggal di wilayah Jambi.

Tercatat bahwa siswa ELS menempuh pembelajaran selama 7 tahun dengan menggunakan bahasa Belanda setiap harinya. Sampai pada sekitar tahun 1934 murid ELS di wilayah keresidenan Jambi berjumlah 44 orang dengan 2 tenaga pengajarnya.<sup>14</sup> Selain ELS ada juga sekolah yang dikhususkan untuk penduduk pribumi di wilayah Jambi namun menggunakan sistem pengajaran Belanda yaitu HIS (*Hollandsch Inlandshe School*). HIS sendiri baru di buka pada tahun 1914 di wilayah Jambi. Kaum pribumi yang dapat bersekolah di HIS sendiri merupakan anak-anak dari *ambtenaar*, anak saudagar, kaum terkemuka dan golongan orang-orang kaya.

Sama halnya dengan ELS, HIS juga menempuh Pendidikan yang sama selama 7 tahun namun pada sekolah HIS mendapat materi tambahan seperti bahasa daerah dan Melayu. Tercatat bahwa sekolah HIS hanya ada di wilayah ibukota Karesidenan Jambi dan pada tahun 1934 jumlah siswa yang bersekolah di HIS sebanyak 194 orang dengan 6 orang pengajar.<sup>15</sup>

*Kedua* Pendidikan dengan dasar-dasar pribumi dengan mengenalkan sekolah kelas dua (*Tweede Klasse Scholen*) oleh pemerintah Belanda kepada masyarakat penduduk pribumi. Hal ini terjadi dikarenakan mulai munculnya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang harus dimiliki oleh penduduk pribumi. Selain itu, dengan banyaknya pendatang-pendatang baru dari Belanda mengakibatkan adanya persaingan diantara keduanya. Sehingga membuat penduduk Jambi harus lebih pintar dan maju dengan para penduduk pendatang agar tidak dapat dikuasai orang-orang Belanda tersebut selain itu dengan banyaknya permohonan untuk didirikannya sekolah, maka pemerintah Belanda mendirikan berbagai sekolah khusus penduduk pribumi.

*Tweede Klasse Scholen* sendiri menempuh Pendidikan selama 3 tahun, kemudian menjadi 5 tahun sejak tahun 1910 dengan jumlah 9 sekolah dan murid sebanyak 576 orang<sup>16</sup>. Sekolah ini didirikan untuk calon pegawai rendah agar dapat

---

<sup>14</sup> Khozy, *op. cit.*, 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 6.

<sup>16</sup> *Ibid.*

menjadi tenaga administrasi yang layak dan baik. *Tweede Klasse Scholen* resmi diubah menjadi Sekolah Desa (*Volkshool*) sejak tahun 1929. Dengan adanya sekolah desa ini lah banyak membantu anak-anak penduduk desa setempat dalam mendapatkan kesempatan belajar guna memberantas buta huruf, baca, tulis dan hitung.

Selain sekolah *Volkshool* didirikan juga sekolah *Vervolgreschool* sebabnyak 10 sekolah yang merupakan sekolah lanjutan dari *volkschool* dengan lama pendidikan 5 tahun. Selain sekolah untuk pribumi, pemerintahan belanda juga mendirikan sekolah bagi orang-orang Tionghoa. Dimana pada tahun 1931 terdapat 3 sekolah khusus orang China (Tiong Hoa) di sekitaran wilayah ibu kota Karesidenan Jambi dan 1 sekolah di Muaro Bungo.

## 2. Pembangunan infrastruktur

Belanda tidak hanya membangun dalam bidang pendidikan saja dan mengambil hasil alam Jambi tetapi belanja banyak menyumbangkan dana yang besar untuk membangun berbagai infrastruktur di Jambi. Semasa Karesidenan di Jambi infrastruktur banyak dibangun seperti, jalan untuk memudahkan transportasi masyarakat dari desa, membangun berbagai jembatan sebagai sarana penghubung dari satu wilayah ke wilayah lainnya, membangun pelabuhan-pelabuhan sebagai sarana pendukung kegiatan ekspor impor, serta mendirikan berbagai kantor pos dan telegram sebagai sarana untuk memperlancar komunikasi serta penyaluran listrik dari pemerintah kepada masyarakat yang lebih luas.

Jadi tidak hanya keuntungan yang di ambil oleh pemerintah belanda terhadap kekayaan yang dimiliki oleh Jambi, namun juga memperhatikan pembangun kota dan juga infrastuktur yang dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat pribumi di Jambi. Tidak hanya di Jambi, pembangunan infrastruktur juga terjadi di daerah kekuasaan Belanda baik itu di Jawa maupun luar pulau Jawa. Hal ini di lakukan oleh pemerintahan Belanda tidak lain yaitu sebagai upaya untuk memperlancar perekonomian di Jambi.

Pada awal pemerintahan O.L Helfirch tahun 1906 pemerintahannya dipusatkan di *afdeeling* Jambi. Kemudian pada tahun 1907 O.L Helfirch membukan jalan-jalan penghubung antar dusun yang awalnya hanya bisa diakses dengan jalan kaki menjadi jalan yang dapat diakses menggunakan kuda. Pembangunan ini terus berlanjut hingga tahun 1910-1913 dimana residen A.L Heyting mengadakan pembangunan jalan penghubung antara Muaro Bungo dan Muaro Tebo dengan panjang 44,5 KM dengan dana pengadaan dana sebesar f 291.000<sup>17</sup>.

Setelah terjadinya pemberontakan yang terjadi pada tahun 1916, pembangunan jalan di wilayah keresidenan Jambi mulai diperbanyak. Hal ini dilihat dari jalan yang dibangun pemerintah dari Jambi ke Muaro Tembesi dengan panjang 92 KM yang merupakan jalan aspal pertama di wilayah Karesidenan Jambi. Selain itu, pemerintahan juga membangun berbagai jembatan mengingat kondisi geografis Jambi merupakan daerah aliran sungai.

---

<sup>17</sup> f artinya gulden yang merupakan simbol dari mata uang Belanda sebelum di ganti menjadi Euro. *Ibid.*, 8.

Tercatat hingga akhir tahun 1910 terdapat empat jembatan yang telah berhasil dibangun. Kemudian pada masa Karesidenan P.J Van der Maulen tahun 1933-1936 diadakan tujuh pembangunan jembatan kabel besar dengan anggaran biaya sebesar f 348.450 dari Muaro Tebo ke Sarolangun. Di tahun ini pula di bangun lapangan udara yang menjadi sebuah lapangan komersial di wilayah Jambi. Selain itu pada tahun 1929 di buat juga sebuah pelabuhan guna memperlanjarkan jalur perdagangan ekspor impor.<sup>18</sup>

Selain itu tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan penerbangan, pemerintah juga melakukan upaya perkembangan daerah dimana pada tahun 1925 diadakan proyek pemasangan listrik di ibukota Jambi dengan bantuan kerjasama kepala *Administrasi Industriele Maatschappij* Palembang.<sup>19</sup> Dan juga pemerintah mendirikan stasiun radio pengirim, jaringan telepon, kantor pos dan telegram pada tahun 1922.

### 3. Kesehatan

Tidak hanya sarana pendukung bagi masyarakat pribumi yang diperhatikan oleh pemerintah keresidenan pada saat itu, tapi pemerintah juga mulai memperhatikan kesehatan penduduk pribumi dimana awalnya fasilitas kesehatan hanya diperuntukan untuk anggota kemiliteran. Namun sejak adanya politik etis maka masyarakat pribumi bisa menikmati sarana dan fasilitas kesehatan dengan diadakannya tenaga-tenaga medis serta resort kesehatan untuk masyarakat di daerah-daerah padat penduduk.

Tercatat pada tahun 1933 keresidenan Jambi memiliki 9 klinik kesetahan. Tidak sampai di situ saja, pemerintahan juga terus menambah fasilitas-fasilitas kesehatan dengan tenaga medisnya.<sup>20</sup> Seperti pada resort kesehatan di wilayah ibukota, Muaro Tebo dan Sarolangun di mana pemerintah menempatkan ahli kesehatan seperti perwira kesehatan dan perwira kesehatan tingkat satu untuk mengolah resort tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bani, Suddin. "POLITIK ETIS" 1, no. 1 (2013).
- Khozy, Muhammad. "Politik\_Etis\_Penerapannya\_di\_Provinsi\_Jambi," n.d.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. 2 ed. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003.
- Laely, Nur. "Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942." *Jurnal Pendidikan*, no. 3 (2018): 1 - 20.
- Margono, Hartono, dan Mujilan J R Chaniago. "Milik Depdikbud Tidak diperdagangkan SEJARAH SOSIAL JAMBI J ambi Sebagai Kota Dagang," 2019, 23 - 50.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori & Metodologi Sejarah*. 1 ed. Yogyakarta, 2015.
- Putra, Erdian Y, dan S Pamungkas. "Jurnal Istorica Jurnal Istorica" 4, no. 1

---

<sup>18</sup> Khozy, *op. cit.* Hal. 9.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 9.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 10.

(2020): 110 – 20.

Sholekhah, Siti, dan Reka Seprina. “Jambi Masa Kolonialisme Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah : Study Kasus Sistem Pemerintahan Belanda Tahun 1615-1942” 1, no. 2 (2022): 1 – 17.

Susilo, Agus, dan Isbandiyah Isbandiyah. “Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia.” *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018): 403.

Transiska, Rizki. “Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda Dan Respon Umat Islam Di Jambi (Tahun 1915-1942 M).” *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 20, no. 1 (2021): 105.